**AKIBAT HUKUM TERHADAP NARAPIDANA YANG MELAKUKAN
PELANGGARAN TATA TERTIB TINDAK KEKERASAN DILEMBAGA
PEMASYARAKATAN KELAS II.APEKANBARU BERDASARKAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1995TENTANG PEMASYARAKATAN**

Oleh : Wino Thantow Malbuano

Pembimbing I: Dr. Erdianto, S.H.,M.HUM

Pembimbing II: Ledy Diana, S.H., M.H

Alamat: Jl. Pramuka

Email / Telepon :malbuanow@yahoo.com / 0852-7006-4035

ABSTRACT

Penitentiary is an institution of the criminal justice subsystem that has a strategic function as the implementation of imprisonment as well as a place of guidance for inmates, as written in Law Number 12 of 1995 Concerning Corrections. The imprisonment system as a criminal offender has lost its independence no longer in accordance with the level of peradap and the dignity of an independent Indonesian nation that has the philosophy of Pancasila, because the imprisonment comes from the view of individualism contained in the invaders' dictionary, which views and treats the convicted person not as a member of the community but is a member of society a public revenge

The problem that the author made the basis of this study is how the legal consequences of prisoners who commit acts of violence in prison and whether the application of sanctions against prisoners who commit violations, in accordance with the purpose of correctional measures. The purpose of this study is to determine the legal consequences of prisoners who commit acts of violence in prison and to determine the application of sanctions against prisoners who commit violations, in accordance with the purpose of correctional measures.

This type of research can be classified into empirical or sociological research types, because in this study the authors directly conduct research at the location or place of study in order to provide a complete and clear picture of the problem under study. This research was conducted at Penitentiary Class II A Pekanbaru City, data sources used are: primary data and secondary data, data collection techniques in this study with observation, interviews and literature review.

The results of this study are first. Legal consequences given by Correctional Staff to prisoners who commit acts of violence in Class II.A Penitentiary Pekanbaru, which is to enter the exile cell for 6 (six) days and can be extended for 2 (two) times 6 (six) days and do not get the right to remission , family visit leave, conditional leave, assimilation, near-free leave, and conditional release in the current year and recorded in register F. But not all violations of the rules of violence that occur in acts are in accordance with severe disciplinary punishment, only acts of violence that cause injuries physical punishment given severe disciplinary, second, the application of sanctions against inmates who violate the rules of violence is not in accordance with the purpose of correctional due to the many inhibiting factors in its implementation, as for the inhibiting factor is the lack of personnel security officers Class II.A Pekanbaru Penitentiary, incomplete facilities and infrastructure of Class II.A Penitentiary, Pekanbaru, over capacity, and many guests visiting Class II.A Penitentiary Pekanbaru.

Keywords: Prisoners, Penitentiary

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Semenjak Indonesia merdeka tahun 1945 setiap warga negara memiliki hak asasi manusia yang terdapat di dalam pasal 28A dan pasal 28I ayat (1) yang berbunyi: Pasal 28A berbunyi “setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”. Pasal 28I ayat (1) berbunyi “hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hak nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak di tuntutan atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun”.

Berdasarkan pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi: “Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”. Ilmu pengetahuan (*doctrine*) mengartikan penganiayaan sebagai, “setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain”.¹ Sedangkan menurut Hooge Raad penganiayaan merupakan setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain,

dan semata-mata menjadi tujuan dari orang itu dan perbuatan tadi tidak boleh merupakan suatu alat untuk mencapai suatu tujuan yang diperkenankan.² Untuk itu undang-undang mengatur setiap orang yang melakukan tindak pidana diasingkan dari masyarakat dan ditempatkan di lembaga pemasyarakatan berdasarkan putusan pengadilan, yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.

Lembaga pemasyarakatan merupakan institusi dari subsistem peradilan pidana mempunyai fungsi strategis sebagai pelaksanaan pidana penjara sekaligus sebagai tempat pembinaan bagi narapidana, sebagaimana ditulis dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Sistem kepenjaraan sebagai pelaksana pidana hilang kemerdekaan kiranya sudah tidak sesuai lagi dengan tingkat peradapan serta martabat bangsa Indonesia yang telah merdeka yang berfalsafahkan Pancasila, karena kepenjaraan berasal dari pandangan individualisme yang terdapat dalam kamus penjajah, yang memandang dan memperlakukan orang terpidana tidak sebagai anggota masyarakat tetapi merupakan suatu pembalasan dendam masyarakat.³

Pidana penjara dalam bentuk pengisolasian diri dari tembok penjara telah mengalami perubahan. Berdasarkan Surat Instruksi Kepala Direktorat

¹Chidir Ali, *Responsi Hukum Pidana: Penyertaan Gabungan Tindak Pidana*, Armico, Bandung, 1985, hlm.83

² *Ibid*

³<https://massofa.wordpress.com/2013/06/26/sejarah-perkembangan-kepenjaraan-di-Indonesia/>, Diakses pada tanggal 29 Agustus 2015.

Pemasyarakatan Nomor J.H.G.8/506 Tanggal 17 Juni 1964 dalam keputusan konferensi dinas para pimpinan kepenjaraan. Sistem pembinaan narapidana telah mengalami pembaharuan, yaitu sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan serta sebagai tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana. Pemenjaraan hanya ditujukan untuk menghukum serta melakukan pembalasan dan pengimbangan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, maka sekarang ini sistem pemenjaraan fungsinya tidak hanya untuk menghukum para terdakwa, tetapi juga sebagai tempat untuk melakukan pembinaan narapidana. Narapidana merupakan terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di lembaga pemasyarakatan. Sedangkan pengertian terpidana itu sendiri adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pembinaan narapidana dilakukan di dalam lembaga pemasyarakatan, sebagaimana yang telah diamanahkan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Pasal 1 ayat 3 yang berisi Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan. Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas

serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktifberperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.⁴

Banyaknya keributan di dalam lembaga pemasyarakatan menyebabkan anggapan masyarakat menjadi buruk terhadap mantan narapidana bahwa penjara itu tempatnya para penjahat, sehingga keberadaan mantan narapidana di tengah-tengah masyarakat sulit untuk diterima dan harus dihindar.⁵ Walaupun negara telah mengatur regulasi tentang lembaga pemasyarakatan yang bertujuan untuk membina para narapidana untuk menjadi lebih baik, namun masih sering terjadi kesenjangan sosial yang mengakibatkan pelanggaran tata tertib lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan yang tertuang didalam Pasal 4 ayat 14 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga

⁴*Loc cit*, ayat (2)

⁵DwidjaPriyanto, *System Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, PT Rafikaaditama, 2006, hlm. 164.

Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara yang berbunyi “Setiap Narapidana atau Tahanan dilarang melakukan tindakan kekerasan, baik kekerasan fisik maupun psikis, terhadap sesama Narapidana, Tahanan, Petugas Pemasyarakatan, atau tamu/pengunjung”. Narapidana atau Tahanan yang melanggar tata tertib tersebut akan dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat yang diatur di dalam Pasal 9 ayat 4 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara yang berbunyi Hukuman Disiplin tingkat berat, meliputi:

1. Memasukkan dalam sel pengasingan selama 6 (enam) hari dan dapat diperpanjang selama 2 (dua) kali 6 (enam) hari; dan
2. Tidak mendapatkan hak remisi, cuti mengunjungi keluarga, cuti bersyarat, asimilasi, cuti menjelang bebas, dan pembebasan bersyarat dalam tahun berjalan dan dicatat dalam register F.

Berdasarkan hasil prariset ke lembaga pemasyarakatan kelas IIA Pekanbaru terdapat banyaknya tindak pidana kekerasan yang dapat dilihat di dalam tabel berikut ini:

Tabel I.1
Tindak Pidana
Kekerasan di Lembaga
Pemasyarakatan Kelas II.A
Pekanbaru

No	Tahun	Jenis Tindak Pidana Kekerasan	Jumlah
1	2015	1. Perkelahian	37
		2. Penganiayaan	11
		3. Pengeroyokan	2
2	2016	1. Perkelahian	17
		2. Penganiayaan	8
		3. Pengeroyokan	1

Hal inilah yang kiranya menjadi dorongan bagi penulis untuk mengetahui bagaimana pemberian sanksi terhadap narapidana yang melakukan tindak pidana kekerasan di lembaga pemasyarakatan kelas IIA Pekanbaru. Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang di tuangkan dalam bentuk proposal skripsi yang berjudul

“AKIBAT HUKUM TERHADAP NARAPIDANA YANG MELAKUKAN PELANGGARAN TATA TERTIB TINDAK KEKERASAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA PEKANBARU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1995 TENTANG PEMASYARAKATAN”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan kasus di atas maka penulis menarik kesimpulan dan menentukan rumusan masalah sebagai berikut;

1. Bagaimanakah akibat hukum terhadap narapidana yang melakukan tindak kekerasan di lembaga pemasyarakatan?

2. Apakah penerapan sanksi terhadap narapidana yang melakukan pelanggaran, sesuai dengan tujuan pemasyarakatan ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai :

- a. Untuk mengetahui akibat hukum terhadap narapidana yang melakukan tindak kekerasan di lembaga pemasyarakatan.
- b. Untuk mengetahui penerapan sanksi terhadap narapidana yang melakukan pelanggaran, sesuai dengan tujuan pemasyarakatan.

Sedangkan kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Sebagai syarat dalam menempuh ujian akhir untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Riau.
- b. Kegunaan penelitian secara teoritis, bagi perkembangan ilmu pengetahuan (dibidang ilmu pengetahuan hukum pidana). Hasil dari penelitian ini dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu pengetahuan di di bidang hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana dalam kaitanya dengan pemberian sanksi terhadap narapidana yang melakukan tindak kekerasan dalam lembaga pemasyarakatan sehingga dapat mencegah dan

mengatasi tindak kekerasan tersebut.

- c. Untuk menambah referensi perpustakaan dan sebagai sumbangan penulis terhadap almamater Universitas Riau Khususnya Fakultas Hukum serta bagi seluruh pembaca.

D. Kerangka Teori

1. Teori Pidana

Terkait dengan apa yang akan dikaji dalam penelitian ini penulis juga menekankan sarana penal yang telah diberlakukan di Indonesia saat ini yaitu pada penerapan sanksi yang menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi didalam penegakan hukum. Dimana apabila digabungkan maka pengertian teori gabungan ini adalah mengajarkan bahwa penjatuhan hukuman adalah untuk mempertahankan tata tertib hukum dalam masyarakat dan untuk memperbaiki pribadi si penjahat.⁶

Hukum Pidana dapat dibagi menjadi dua yaitu hukum pidana subjektif dan hukum pidana objektif. Pada hukum pidana subjektif berarti suatu hak atau kewenangan negara untuk menjatuhkan dan menjalankan pidana kepada orang yang terbukti telah melanggar larangan dalam hukum pidana. Sementara itu, larangan dalam hukum pidana ini disebut dengan hukum pidana objektif.

Hukum pidana objektif berisi tentang berbagai macam

⁶Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 105.

perbuatan yang dilarang, yang terhadap perbuatan-perbuatan itu telah ditetapkan ancaman pidana kepada barangsiapa yang melakukannya. Sanksi pidana yang telah ditetapkan didalam undang-undang tersebut kemudian oleh negara dijatuhkan dan dijalankan kepada pelaku perbuatan. Hak dan kekuasaan negara yang demikian merupakan suatu kekuasaan yang sangat besar, yang harus dicari dan diterangkan dasar-dasar pijakannya.⁷

Mengenai teori-teori pembedaan (dalam banyak literatur hukum disebut dengan teori hukum pidana/*strafrecht-theorien*) berhubungan langsung dengan pengertian hukum pidana subjektif tersebut. Teori-teori ini mencari dan menerangkan tentang dasar dari hak negara dalam menjatuhkan dan menjalankan pidana tersebut. Banyaknya anggapan bahwa hukum pidana ini sendiri menyerang hak dan kepentingan hukum pribadi pelaku, namun yang sebenarnya adalah ancaman hukuman pidana itu sendiri melindungi kepentingan, hak dan kenyamanan subjek hukum yang lainnya.

Jelas kiranya pidana yang diancamkan dalam Pasal 10 KUHP itu apabila telah diterapkan, justru menyerang kepentingan hukum dan hak pribadi manusia yang sebenarnya dilindungi oleh

hukum. Tentulah hak menjalankan hukum pidana subjektif ini sangat besar sehingga hanya boleh dimiliki oleh negara saja. Negara merupakan organisasi sosial yang tertinggi, yang bertugas dan berkewajiban menyelenggarakan dan mempertahankan tata tertib masyarakat. Dalam rangka melaksanakan kewajiban dan tugas itu, maka wajar jika negara melalui alat-alatnya diberi hak dan kewenangan untuk menjatuhkan pidana.⁸

Kepentingan pidana perlu dijatuhkan bagi hakim yang bijak, maka ia akan menarik dan menetapkan amar putusan, ia terlebih dahulu akan merenungkan dan mempertimbangkan benar tentang manfaat apa yang akan dicapai dari penjatuhan pidana (jenis dan berat ringannya) baik bagi terdakwa, maupun masyarakat dan negara. Dalam keadaan demikian teori hukum pidana dapat membantunya, ketika jaksa hendak membuat tuntutan dan hakim hendak menjatuhkan pidana apakah berat atau ringan, seringkali bergantung pada pendirian mereka mengenai teori-teori pembedaan yang dianut.⁹

2. Teori Pertanggung jawaban pidana

Sistem pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana positif

⁷AdamiChazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2008, hlm. 155.

⁸*Ibid*, Hlm. 156.

⁹*Ibid*, hlm. 157.

saat ini menganut asas kesalahan sebagai salah satu asas disamping asas legalitas. Pertanggungjawaban pidana merupakan bentuk perbuatan dari pelaku tindak pidana terhadap kesalahan yang dilakukannya. Dengan demikian, terjadinya pertanggungjawaban pidana karena adanya kesalahan yang merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang, dan telah ada aturan yang mengatur tindak pidana tersebut. Roeslan Saleh mengatakan bahwa:¹⁰“Dalam membicarakan tentang pertanggungjawaban pidana, tidaklah dapat dilepaskan dari satu dua aspek yang harus dilihat dengan pandangan-pandangan falsafah. Satu diantaranya adalah keadilan, sehingga pembicaraan tentang pertanggungjawaban pidana akan memberikan kontur yang lebih jelas. Pertanggungjawaban pidana sebagai soal hukum pidana terjalin dengan keadilan sebagai soal

filsafat”. Pengertian perbuatan pidana tidak termasuk hal pertanggungjawaban pidana. Perbuatan pidana hanya menunjuk pada dilarangnya perbuatan. Apakah orang yang telah melakukan perbuatan itu kemudian juga dipidana tergantung pada soal, apakah

dia dalam melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau tidak apabila orang yang melakukan perbuatan pidana itu memang mempunyai kesalahan, maka tentu dia akan dipidana. Tetapi, manakala dia tidak mempunyai kesalahan, walaupun dia telah melakukan perbuatan yang terlarang dan tercela, dia tidak dipidana. Asas yang tidak tertulis: “Tidak dipidana jika tidak ada kesalahan”, tentu merupakan dasar daripada dipidannya si pembuat.¹¹

Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pembedaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya suatu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum (dan tidak ada peniadaan sifat melawan hukum atau *rechts vaardigingsground* atau alasan pembenar) untuk orang itu dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggungjawab yang dapat

¹⁰Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hlm. 10.

¹¹Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1983, hlm. 75.

dipertanggungjawabkan-
(pidana)-kan.¹²

Dalam bahasa asing pertanggungjawaban pidana disebut sebagai *“toerekenbaarheid”*, *“criminal responsibility”*, *“criminal liability”*. Bahwa pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka/terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana (crime) yang terjadi atau tidak. Dengan perkataan lain apakah terdakwa akan dipidana atau dibebaskan. Jika ia, dipidana, harus ternyata bahwa tindakan yang dilakukan itu bersifat melawan hukum dan terdakwa mampu bertanggungjawab. Kemampuan tersebut memperlihatkan kesalahan dari petindak yang berbentuk kesengajaan atau kealpaan. Artinya tindakan tersebut tercela tertuduh menyadari tindakan yang dilakukan tersebut.¹³

Pertanggungjawaban pidana adalah suatu perbuatan yang tercela oleh masyarakat yang harus dipertanggungjawabkan pada si pembuatnya atas perbuatan yang dilakukan. Dengan mempertanggungjawabkan perbuatan yang tercela itu

pada si pembuatnya, apakah si pembuatnya juga dicela ataukah si pembuatnya tidak dicela. Pada hal yang pertama maka si pembuatnya tentu dipidana, sedangkan dalam hal yang kedua si pembuatnya tentu tidak dipidana.¹⁴

Kesalahan dalam arti seluas-luasnya, dapat disamakan dengan pengertian pertanggungjawaban dalam hukum pidana. Didalamnya terkandung makna dapat dicelanya si pembuat atas perbuatannya. Jadi, apabila dikatakan bahwa orang itu bersalah melakukan sesuatu tindak pidana, maka itu berarti bahwa ia dapat dicela atas perbuatannya.¹⁵

Menurut Roeslan Saleh, beliau mengatakan bahwa: “Dalam pengertian perbuatan pidana tidak termasuk hal pertanggungjawaban. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarangnya perbuatan. Apakah orang yang telah melakukan perbuatan itu kemudian juga dipidana, tergantung pada soal apakah dia dalam melakukan perbuatan itu memang mempunyai kesalahan atau tidak. Apabila orang yang melakukan perbuatan pidana itu memang mempunyai

¹² E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1982, hlm. 249.

¹³ *Ibid*, hlm. 250.

¹⁴ *Op. Cit*, Roeslan Saleh, hlm. 75-76.

¹⁵ Tri Andrisman, *Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, Penerbit Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2009, hlm. 95

kesalahan, maka tentu dia akan dipidana”¹⁶.

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jika dilihat dari

No	Jenis Populasi	Populasi	Sampel	Persentase (%)
1	Kepala Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Pekanbaru	1	1	100 %
2	Kepala Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA	49	10	21%
3	Pelaku Tindak Pidana Kekerasan	76	10	14%
jumlah		126	22	-

jenisnya, penelitian ini tergolong kedalam penelitian hukum sosiologis yaitu penelitian yang diperoleh secara langsung dari masyarakat atau penelitian data primer. Sedangkan jika dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif, yang berarti penelitian yang dimaksud untuk memberikan gambaran secara rinci, jelas dan sistematis tentang permasalahan dari masalah pokok penelitian.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat penulis melaksanakan penelitian, yang diambil oleh penulis adalah di Lembaga

Pemasyarakatan Kelas II A Kota Pekanbaru

3. Populasi dan Sampel

Populasi adalah jumlah keseluruhan dari obyek yang akan diteliti.¹⁷ Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi yang dapat mewakili. Adapun yang menjadi populasi dan sampel dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 1.1

Populasi dan Sampel

Sumber: Data Olahan Lapangan Tahun 2018

4. Sumber Data

Penulisan ini menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini antara lain :

- Bahan hukum primer yaitu sumber data yang diperoleh secara langsung dari hasil penelitian lapangan yang ada kaitan dengan obyek penulisan yaitu melalui wawancara dan kuesioner dengan responden;
- Bahan hukum sekunder yaitu sumber data yang diperoleh dari hasil mempelajari literatur berupa buku-buku, Jurnal, yang berkaitan

¹⁶Loc, Cit, RoeslanSaleh, *PerbuatanPidanadanPertanggungjawabanPidanaDuaPengertianDasarDalamHukumPidana*.

¹⁷Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta: 2005, hlm. 118.

dengan permasalahan penelitian penulis;

- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dalam bentuk kamus dan Internet.

5. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Studi Lapangan, studi lapangan ini dimaksudkan yaitu penulis langsung melakukan penelitian pada lokasi atau objek yang telah ditentukan. Teknik pengumpulan data studi lapangan ditempuh dengan cara sebagai berikut;
- 2) Wawancara, yaitu cara memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada pihak-pihak yang diwawancarai terutama orang-orang yang berwenang, mengetahui dan terkait dengan permasalahan yang ada. Sistem wawancara dalam penelitian ini adalah wawancara bebas dan dipimpin yang artinya terlebih dahulu dipersiapkan daftar pertanyaannya.

- 3) Studi Pustaka, yaitu dengan membaca buku, majalah, surat kabar, dokumen-dokumen, undang-undang dan media informasi lain yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti.

6. Analisa Data

Data yang diperoleh baik dari studi lapangan maupun studi dokumen, pada dasarnya merupakan data tataran yang dianalisis secara deskriptif, yaitu: setelah data terkumpul kemudian dituangkan dalam bentuk uraian logis dan sistematis, selanjutnya dianalisis untuk memperoleh kejelasan penyelesaian masalah, kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu dari hal yang bersifat umum menuju hal yang bersifat khusus. Dalam penarikan kesimpulan, penulis menggunakan metode penarikan kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum menuju penulisan yang bersifat khusus.

II. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Akibat Hukum Terhadap Narapidana Yang Melakukan Pelanggaran Tata Tertib Tindak Kekerasan Di Lembaga Masyarakat Kelas II. A Pekanbaru

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga

Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara, dalam pasal 4 angka 14 menyatakan sebagai berikut:¹⁸“Setiap Narapidana atau Tahanan dilarang melakukan tindakan kekerasan, baik kekerasan fisik maupun psikis, terhadap sesama Narapidana, Tahanan, Petugas Pemasyarakatan, atau tamu/pengunjung”

Tetapi pada kenyataannya di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II.A Pekanbaru sering terjadi pelanggaran tata tertib yaitu narapidana yang melakukan tindak pidana kekerasan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II.A Pekanbaru. Berdasarkan hasil riset ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas II.A Pekanbaru terdapat banyaknya tindak pidana kekerasan yang dapat dilihat di dalam tabel berikut:

**Tabel IV.1
Tindak Pidana
Kekerasan di Lembaga
Pemasyarakatan Kelas II.A**

No	Tahun	Jenis Tindak Pidana Kekerasan	Jumlah
1	2015	Perkelahian	37
		Penganiayaan	11
		Pengeroyokan	2
2	2016	Perkelahian	17
		Penganiayaan	8
		Pengeroyokan	1

Pekanbaru

¹⁸Pasal 4 ayat 14 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013, tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara.

Sumber Data: Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II.A Pekanbaru

Berdasarkan wawancara penulis dengan Kepala Pengamanan Lembaga pemasyarakatan Kelas II.A Pekanbaru bapak Zulkifli, mengatakan adapun faktor-faktor yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran tata tertib tindak kekerasan sesama narapidana disebabkan beberapa faktor:

1. Over kapasitas, sempitnya ruang gerak Narapidana mengakibatkan rentan terjadinya pergesekan.
2. Terjadinya pencurian, sehingga terdapat pihak yang merasa dirugikan dan pihak yang dirugikan mencurigai seseorang yang menyebabkan perdebatan dan memicu terjadinya perkelahian.
3. Masalah keluarga, merupakan salah satu faktor yang sangat mempengaruhi psikologi narapidana, sehingga narapidana tersebut lebih sensitif dan lebih mudah tersinggung.
4. Dendam pribadi.

Apabila pelanggaran tata tertib tindak kekerasan di Lembaga pemasyarakatan Kelas II.A Pekanbaru ini terjadi, maka Narapidana tersebut akan diberikan sanksi yaitu hukuman disiplin tingkat berat yang tertuang dalam Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara, dalam

pasal 9 ayat 4 menyatakan sebagai berikut:

- a. Memasukkan dalam sel pengasingan selama 6 (enam) hari dan dapat diperpanjang selama 2 (dua) kali 6 (enam) hari; dan
- b. Tidak mendapatkan hak remisi, cuti mengunjungi keluarga, cuti bersyarat, asimilasi, cuti menjelang bebas, dan pembebasan bersyarat dalam tahun berjalan dan dicatat dalam register F.

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II. A Pekanbaru bapak Zulkifli mengatakan, tidak semua pelanggaran tata tertib kekerasan yang terjadi di tindak sesuai dengan hukuman disiplin tingkat berat, hanya tindak kekerasan yang menyebabkan cedera fisik yang diberikan hukuman disiplin tingkat berat, namun dialihkan dengan hukuman sesuai dengan kebijakan petugas pengamanan. Kebijakan ini diambil dikarenakan terbatasnya fasilitas yang dimiliki oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas II.A Pekanbaru yaitu kurangnya ruangan sel pengasingan.

Jadi menurut penulis akibat hukum narapidana yang melakukan tindak penganiayaan di lapas adalah dengan memberikan sanksi kepada narapidana yang melakukan penganiayaan, sanksi tersebut dapat berupa sanksi administrative, sanksi administrative itu sendiri dapat berupa Tidak mendapatkan hak remisi, cuti mengunjungi

keluarga, cuti bersyarat, asimilasi, cuti menjelang bebas, dan pembebasan bersyarat, selain itu juga dapat dikenai sanksi pengasingan yaitu di masukan kedalam sel pengasingan dalam kurun waktu 6-8 hari dan dilakukan pembinaan agar narapidana tersebut tidak melakukan tindak pidana penganiayaan

B. Penerapan Sanksi Terhadap Narapidana Yang Melakukan Pelanggaran

Lembaga Pemasyarakatan adalah suatu Lembaga yang menampung orang-orang bermasalah dalam hukum dimana Lemabaga Pemasyarakatan berupaya merubah perilaku narapidana yang memiliki masalah dengan hukum. Hal ini sesuai dengan teori hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara yang mengadakan dasar-dasar aturan untuk:

- a) Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa tindak tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
- b) Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.

- c) Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang telah disangka melakukan pelanggaran larangan tersebut.

Tujuan penyelenggaraan Sistem Pemasyarakatan adalah pembentukan wargabinaan menjadi manusia yang seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana, kembali kemasyarakat, aktif dalam pembangunan, hidup wajar sebagai warganegara dan bertanggung jawab, oleh karena itu mereka dibina secara baik dan efektif. Dengan proses pembinaan dan pembimbingan berupaya agar tidak mengulangi perbuatan yang dulu pernah dilakukan. Jika dilihat survei di lapangan pembinaan berjalan dengan lancar. Hal ini bisa dikatakan dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan para narapidana maupun petugas Lapas. Para petugas pun tidak mengalami kesulitan yang berarti dalam pembinaan. Para narapidana mengakui bahwa pembinaan yang diberikan oleh petugas memang diperlukan untuk bekal hidup setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan. Mayoritas narapidana yang penulis wawancarai mengatakan setelah keluar dari Lapas ingin mengunjungi kedua orang tua dan keluarga untuk meminta maaf atas perbuatan yang pernah dilakukan, serta ingin mencari pekerjaan yang layak agar tidak terjerumus keperbuatan yang dulu pernah

diperbuat, serta perlahan memperbaiki keempat pembaharuan dalam hal percepatan over kapasitas hak narapidana dan percepatan penyelesaian over kapasitas.

Sedangkan fungsinya menjadikan warga binaan menyatu (integral) dengan sehat dalam masyarakat serta berperan bebas dan bertanggung jawab. Dengan bekal pembinaan kepribadian, petugas berharap dengan memberikan bekal ketrampilan maka dapat menumbuhkan rasa kemandirian terhadap narapidana setelah keluar dari Lapas. Oleh sebab itu Lembaga Pemasyarakatan berusaha semaksimal mungkin dalam memberikan pembinaan ketrampilan yang diberikan bagi narapidana. Jika dilihat dari kemampuan narapidana sudah cukup menguasai semua pembinaan ketrampilan yang diberikan oleh para petugas, namun tidak semua warga binaan bisa menguasai ketrampilan yang diberikan petugas, kurangnya keseriusan para narapidana dalam menerima pembinaan ketrampilan dijadikan faktor utama, padahal pembinaan ketrampilan itu sendiri membentuk narapidana menjadi mandiri dan dapat dijadikan bekal untuk mereka setelah keluar dari Lapas.

Sedangkan kepribadian sendiri manusia seutuhnya ditafsirkan narapidana atau anak pidana sebagai sosok manusia yang diarahkan ke fitrahnya untuk menjalin hubungan dengan Tuhan, pribadi, serta lingkungan. Maka pembinaan

kepribadian dengan kemandirian memberikan bekal bagi narapidana untuk merubah perilaku dari perilaku yang tidak terpuji, menjadi perilaku yang baik, ramah, santun dan religius. Apabila setelah keluar narapidana bisa menerapkan bekal yang diberikan maka tidak sulit untuk mencari pekerjaan diluar sana. 88 Pandangan utilitarian melihat pidanaaan dari segi manfaat atau kegunaanya dimana yang dilihat situasi atau keadaan yang ingin dihasilkan dengan dijatuhkan pidana itu. Disatu pihak, pidanaaan dimaksudkan untuk memperbaiki sikap atau tingkah laku terpidana dan pihak lain pidanaaan itu juga dimaksudkan untuk mencegah orang lain dari kemungkinan melakukan kegiatan serupa.

Pandangan ini dikatakan berorientasi ke depan (forward-looking) dan sekaligus mempunyai sifat pencegahan (deterrence). Di Lembaga Pemasyarakatan Pekalongan mempunyai narapidana yang mengulangi perbuatannya atau disebut residivis. Jika dilihat dari statusnya maka narapidana tidak cukup sekali dalam melakukan aksi perbuatan kejahatan. Hal ini bisa dilihat dari Upaya Pembinaan yang dilakukan Lapas belum cukup berhasil atau gagal dalam membina narapidana tersebut, tetapi apabila dilihat perbandingan data residivis yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Pekalongan sangat sedikit, sehingga dapat dikatakan upaya pembinaan dan pembimbingan yang dilakukan Lapas Pekalongan

telah memenuhi sasaran dan efektif. Namun ukuran sukses dan gagal tidak dilihat dari pembinaan yang diberikan oleh petugas, tetapi bagaimana cara narapidana menggunakan bekal pembinaan itu agar benar-benar bermanfaat setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Akibat hukum yang diberikan Pegawai Pemasyarakatan terhadap narapidana yang melakukan tindak kekerasan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II.A Pekanbaru yaitu memasukkan dalam sel pengasingan selama 6 (enam) hari dan dapat diperpanjang selama 2 (dua) kali 6 (enam) hari dan Tidak mendapatkan hak remisi, cuti mengunjungi keluarga, cuti bersyarat, asimilasi, cuti menjelang bebas, dan pembebasan bersyarat dalam tahun berjalan dan dicatat dalam register F. Tetapi tidak semua pelanggaran tata tertib kekerasan yang terjadi di tindak sesuai dengan hukuman disiplin tingkat berat, hanya tindak kekerasan yang menyebabkan cedera fisik yang diberikan hukuman disiplin tingkat berat. Penerapan sanksi terhadap narapidana yang melakukan pelanggaran tata tertib tindak kekerasan belum sesuai dengan tujuan pemasyarakatan dikarenakan banyaknya faktor penghambat dalam pelaksanaannya, adapun

faktor penghambatnya adalah kurangnya personil petugas pengamanan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II.A Pekanbaru, belum lengkapnya sarana dan prasarana Lembaga Pemasyarakatan Kelas II.A Pekanbaru, over kapasitas, dan banyaknya tamu yang berkunjung ke dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II.A Pekanbaru.

B. Saran

1. Diharapkan adanya pelatihan khusus mengenai pembinaan narapidana bagi para Pembina di Lembaga Pemasyarakatan khususnya di Lapas Pekalongan agar pembinaan yang dilakukan terhadap narapidana bisa lebih efektif dan berpengaruh besar pada kepribadian narapidana.
2. Diharapkan pemberian sanksi terhadap narapidana yang melakukan pelanggaran ketertiban dapat dilakukan secara maksimal

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- AdamiChazawi, 2008, *PelajaranHukumPidana*, PT. Raja Grafindo, Jakarta
- Bambang Sunggono, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Chidir Ali, 1985, *Responsi Hukum Pidana:*

Penyertaan dan Gabungan Tindak Pidana, Armico, Bandung

C.S.T. Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta

Djoko Prakoso, 1988, *Hukum Penitensir di Indonesia*, Armico, Bandung

DwidjaPriyanto, 2006, *SystemPelaksanaanPidanaPenjaraDi Indonesia*, PT Rafikaaditama, Jakarta

ErdiantoEfendi, 2011, *HukumPidana Indonesia SuatuPengantar*, PT. RefikaAditama

E.Y. Kanterdan S.R Sianturi, 1982, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta

Hasan Langgulun, 1986, *Manusia dan Pendidikan*, (suatu analisis psikologi dan pendidikan), Jakarta, Pustaka alHusna

B. Jurnal Hukum

Reinald Pinangkaan, “*Pertanggung jawaban Pidana dan Penerapan Sanksi dalam Pembaharuan Sistem Pidana Anak di Indonesia*”, *Jurnal, Lex Crimen* Vol.II, Nomor 1 Januari-Maret 2013

Adelia Yunita “*Konsekuensi Hukum Tindak Pidana Narkotika Jenis Baru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*”, Pekanbaru, Skripsi, 2014